

 PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG	NOMOR SOP	:	531 TAHUN 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	19 Juni 2025
	TANGGAL REVISI	:	2025
	TANGGAL EFEKTIF	:	2025 S/D ADANYA REVISI SELANJUTNYA
		:	KEPALA DINAS 3AP2KB
	DISAHKAN OLEH		 Dr. THHAR, SE. M.Si PEMBINA TINGKAT I (V.b) NIP.197306052001121005
	NAMA SOP	:	: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (ANALISIS GENDER)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL	MEMAHAMI PEMBUATAN ADMINISTRASI KEGIATAN	
2	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH		
3	PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH		
4	PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER		
5	PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA TANGERANG		
6	PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
7	PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
8	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1. DASAR HUKUM PENUNJANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA TANGERANG	
		2. DAFTAR NAMA STAKEHOLDER INTERNAL PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA TANGERANG	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. APABILA TIDAK DILAKSANAKAN MAKA TIDAK AKAN ADANYA ANALISIS GENDER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			
2. JIKA SOP TIDAK DILAKSANAKAN AKAN MENGHAMBAT PROSES PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA TANGERANG			

PEMERINTAH KOTA TANGERANG									
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN									
NOMOR									
NO. REVISI/TERBITAN									
TANGGAL BERLAKU									
HALAMAN									
SOP PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (ANALISIS GENDER)									
NO	PROSES	PELAKSANAAN				PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	KETERANGAN
		KETUA TIM KERJA	KABID	KADIS	SEKRETARIS DAERAH				
1	MENGUSULKAN DRAFT SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER						DRAFT SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER	3 JAM	DRAFT SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER
2	MEMBUAT DRAFT SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER						DRAFT SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER	3 JAM	SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER
3	MENGALUKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER						SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER	24 JAM	SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER
4	MENETAPKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER						SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER	80 JAM	SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER
5	MENYAMPAIKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER KEPADA DINAS DARI BAGIAN UMUM						SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER	3 JAM	SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER
6	MENYAMPAIKAN SURAT KEPUTUSAN KE BIDANG						SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER	1 JAM	SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER
7	MENYIMPAN DAN MENDISTRIBUSIKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER						SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER	24 JAM	SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ANALISIS GENDER
8	MENGUMPULKAN HASIL ANALISIS GENDER DARI STAKEHOLDER PUG (OPD) BERUPA ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) TINGKAT KOTA						HASIL ANALISIS GENDER DARI STAKEHOLDER PUG (OPD) BERUPA ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) TINGKAT KOTA TANGERANG	200 JAM	HASIL ANALISIS GENDER DARI STAKEHOLDER PUG (OPD) BERUPA ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) TINGKAT KOTA TANGERANG
9	MENGKOREKSI DAN MEREKAPITULASI HASIL ANALISIS GENDER DARI STAKEHOLDER PUG (OPD) BERUPA ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) TINGKAT KOTA TANGERANG						DATA REKAPITULASI ANALISIS GENDER ANALISIS STAKEHOLDER PUG (OPD) BERUPA ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) TINGKAT KOTA TANGERANG	80 JAM	DATA REKAPITULASI ANALISIS GENDER ANALISIS STAKEHOLDER PUG (OPD) BERUPA ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) TINGKAT KOTA TANGERANG
10	MENGKOREKSI PELAPORAN HASIL ANALISIS GENDER DARI STAKEHOLDER PUG (OPD) BERUPA REKAPITULASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)						LAPORAN DATA REKAPITULASI ANALISIS GENDER ANALISIS STAKEHOLDER PUG (OPD) BERUPA ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) TINGKAT KOTA TANGERANG	40 JAM	LAPORAN DATA REKAPITULASI ANALISIS GENDER ANALISIS STAKEHOLDER PUG (OPD) BERUPA ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) TINGKAT KOTA TANGERANG
11	MELAPORKAN HASIL ANALISIS GENDER DARI STAKEHOLDER PUG (OPD) BERUPA REKAPITULASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)						LAPORAN DATA REKAPITULASI ANALISIS GENDER ANALISIS STAKEHOLDER PUG (OPD) BERUPA ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) TINGKAT KOTA TANGERANG	15 JAM	LAPORAN DATA REKAPITULASI ANALISIS GENDER ANALISIS STAKEHOLDER PUG (OPD) BERUPA ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) TINGKAT KOTA TANGERANG
Jumlah							473 JAM		